



# LAPORAN PENYELENGGARAAN

WEBINAR

“TANTANGAN DAN PELUANG DIPLOMASI PARLEMEN DALAM PEMULIHAN PASCA-COVID-19”

Jakarta, 8 Desember 2020



BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN

WEBINAR BKSAP



*“Tantangan dan Peluang Diplomasi Parlemen  
Dalam Pemulihan Pasca COVID-19”*

**BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**



## LAPORAN PENYELENGGARAAN

### BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

#### WEBINAR

#### “TANTANGAN DAN PELUANG DIPLOMASI PARLEMEN DALAM PEMULIHAN PASCA-COVID-19”

SELASA, 8 DESEMBER 2020

#### I. PENDAHULUAN

##### A. SUSUNAN DELEGASI

NO	NO. ANG.	NAMA	JABATAN/FRAKSI
1.	A – 162	Charles Honoris	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Wakil Ketua BKSAP</li><li>▪ Anggota Komisi I</li><li>▪ Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan</li></ul>
2.	A - 262	Irene Yusiana Roba	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Anggota BKSAP</li><li>▪ Anggota Komisi X</li><li>▪ Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan</li></ul>

##### B. VISI DELEGASI

- Sebagai *focal point* diplomasi parlemen, termasuk upaya dalam menghadapi pandemi COVID-19, pemulihan, dan situasi pasca-pandemi, diplomasi perlu diperkuat dan dipersiapkan untuk menjelajahi beragam peluang yang tersedia dalam mempersiapkan hubungan luar negeri yang lebih kuat, beragam, dan bermanfaat bagi kepentingan nasional sejalan dengan mandat konstitusi.

### C. MISI DELEGASI

- Publik perlu mengetahui apa saja tantangan dan peluang diplomasi parlemen yang tersedia dalam menyikapi situasi pandemi, pemulihan dan pascapandemi. Publik juga perlu mengetahui diplomasi seperti apa yang telah dilakukan selama ini oleh DPR RI dan apa yang perlu diperkuat ke depan agar dapat merepresentasikan sebenar-benarnya keinginan masyarakat khususnya mereka yang menjadi basis konstituen anggota DPR RI.
- BKSAP memiliki program penjangkauan publik (*public outreach*) untuk memperluas pemahaman publik akan diplomasi parlemen dan juga dalam upaya menjangring suara yang mencerminkan aspirasi masyarakat setempat dalam berdiplomasi dan menjalin kerja sama baik multilateral dan internasional.

### D. PERSIAPAN PELAKSANAAN WEBINAR

Materi yang dijadikan referensi bagi Delegasi BKSAP DPR RI dipersiapkan oleh Tenaga Ahli dan Sekretariat KSI BKSAP berupa ToR, Agenda Pertemuan, Pidato, Saran Butir Wicara mengenai “Tantangan Pencapaian SDGs di Tengah Pandemi COVID-19”

## II. ISI LAPORAN

### A. AGENDA WEBINAR

PUKUL	AGENDA
13.00 – 13.10	Pembukaan oleh moderator
13.10 – 13.30	Presentasi oleh Wakil Ketua BKSAP, Bapak Charles Honoris
13.30 – 13.50	Presentasi oleh Anggota BKSAP, Ibu Irine Yusiana Roba Putri
13.50 – 14.30	Tanya Jawab Peserta
14.30	Penutup

## **B. SITUASI UMUM**

1. **Charles Honoris, MP, Wakil Ketua BKSAP DPR RI** menyampaikan presentasi sebagai berikut:

- a. **Situasi COVID-19 terkini**

Beliau menyampaikan terima kasih atas kesempatan untuk berbagi dan berdiskusi dengan para peserta web seminar (Webinar) BKSAP DPR RI kali ini yang bertajuk *Tantangan dan Peluang Diplomasi Parlemen dalam Pemulihan Pasca-COVID-19*. Sebelum berdiskusi lebih lanjut, beliau mengingatkan situasi COVID-19 baik global dan nasional masih relatif tinggi. [Data terlampir]. Beliau juga mengingatkan kepada para peserta sekalian tetap mematuhi berbagai anjuran dan protokol kesehatan yang ada. Tetap sehat dan menjaga diri dan jarak, rajin cuci tangan dan hindari bepergian bila tidak mendesak.

- b. **Tentang Diplomasi Parlemen**

Pandemi belum berakhir, tetapi diplomasi, termasuk diplomasi parlemen tidak boleh berhenti. Dalam tema diskusi kali ini, beliau berbagi perspektif mengenai apa yang dimaksud diplomasi parlemen. Diplomasi Parlemen dapat diartikan sebagai upaya parlemen dalam mendukung kegiatan diplomasi yang dilakukan pemerintah. Berbagai literatur dan studi telah memotret fenomena diplomasi parlemen yang dilakukan di berbagai belahan dunia.

Salah satunya adalah tulisan dari *Frans W. Weisglas* dan *Gonnie de Boer* yang ditulis dalam *The Hague Journal of Diplomacy* tahun 2007. Mereka merangkum diplomasi parlemen sebagai “serangkaian aktivitas internasional yang dilakukan anggota parlemen untuk meningkatkan saling pengertian antar-negara, saling membantu untuk meningkatkan kontrol terhadap pemerintah dan keterwakilan rakyat, serta untuk meningkatkan legitimasi demokrasi dari organisasi internasional antar-pemerintah.”

Inter-Parliamentary Union (IPU) *Presidential Statement* tahun 2019 menerangkan diplomasi parlemen sebagai bagian esensial dari kerja sama internasional, membantu untuk membangun jembatan (komunikasi) antara negara dan rakyat dan berkontribusi dalam menyampaikan perspektif parlemen ke dalam tata kelola global dan juga pemajuan perdamaian.

Dalam hal ini mengapa diplomasi parlemen menjadi relevan? Pada pelaksanaan diplomasi parlemen sejumlah manfaat dapat dipetik: seperti komunikasi antarparlemen yang lebih fleksibel, terus terang tanpa kekakuan diplomatik maupun berperan sebagai pelengkap informasi dan penguat dialog antar-aktor-aktor berbagai negara.

#### **c. Dasar Hukum Diplomasi Parlemen**

Diplomasi Parlemen memiliki justifikasi memadai baik dari sisi peran parlemen dalam urusan luar negeri pada level Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya (seperti menyetujui perang dan perdamaian, kerja sama dengan negara lain hingga pertimbangan pengangkatan Duta Besar) maupun pada level Undang-Undang.

Undang-Undang No. 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri, membuka ruang yang dianggap sebagai penyelenggara Hubungan Luar Negeri, yakni Pemerintah dan Non-Pemerintah (Pasal 5). Dalam penjelasan UU, yang dimaksud Non-Pemerintah adalah perorangan, NGO, dan termasuk DPR.

Selain itu, UU tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) beserta perubahannya menegaskan fungsi DPR dijalankan dalam kerangka representasi rakyat dan mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan aktivitas politik luar negeri (Pasal 69 ayat 2).

Peraturan DPR No 1/2020 tentang Tata Tertib DPR juga selain mengatur peran, tugas dan mekanisme kerja BKSAP, juga memberi pendalaman tersendiri melalui Bab Peran Diplomasi DPR yang membuka peran Diplomasi Anggota DPR untuk mendukung upaya Diplomasi Pemerintah (pasal 247 ayat 2).

#### **d. Tentang BKSAP DPR RI**

Untuk melaksanakan Diplomasi Parlemen, maka, melalui UU MD3 beserta perubahannya, DPR membentuk BKSAP. BKSAP menjadi alat kelengkapan DPR serupa dengan Komisi, Badan Anggaran, Badan Legislasi, Badan Musyawarah, BURT, hingga Mahkamah Kehormatan Dewan.

Jumlah anggota BKSAP sekitar 50 orang yang bersifat lintas-fraksi dan lintas-komisi, sehingga diplomasi yang dilakukan sangat beragam dan multi-bidang. 5 (lima)

Pimpinan BKSAP terdiri dari Ketua BKSAP, Dr. Fadli Zon (Fraksi Partai Gerindra), dan Wakil Ketua masing-masing: Charles Honoris (Fraksi PDI Perjuangan), Putu Supadma Rudana (Fraksi Partai Demokrat), Dr. Mardani Ali Sera (Fraksi PKS) dan Achmad Hafizs Tohir (Fraksi PAN).

BKSAP merupakan *focal point* dari Diplomasi Parlemen Indonesia dengan sejumlah tugas seperti membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan/atau anggota parlemen negara lain. BKSAP juga menerima dan mengkoordinasikan penerimaan tamu luar negeri, hingga memberi saran kepada DPR mengenai aspek-aspek kerja sama antar-parlemen.

**e. Tantangan Diplomasi Pascapandemi**

Dalam situasi krisis/pandemi seperti saat ini, dunia menghadapi ketidakpastian arah pembangunan maupun kerja sama global. Pandemi COVID-19 menyebabkan perubahan dalam berbagai aspek, termasuk dalam konteks diplomasi.

Hal yang paling mencolok pada saat ini adalah adanya **restriksi aktivitas**. Pembatasan aktivitas tersebut tidak hanya berpengaruh pada interaksi antar-masyarakat di dalam negeri. Aktivitas diplomasi pun terganggu. Beragam agenda lobi, multilateral, dialog yang melibatkan pertemuan secara fisik terpaksa batal. Perjalanan diplomatik, penginapan, restoran mengalami pengurangan aktivitas besar-besaran.

Situasi yang telah berlangsung selama berbulan-bulan, meskipun saat ini telah ada secercah harapan, memaksa publik untuk menghilangkan rasa kebosanan mereka dengan nekat beraktivitas. Dampaknya, hingga saat ini, banyak ditemukan kasus-kasus selain reinfeksi COVID-19, juga kasus adanya gelombang kedua, hingga ketiga. Di Indonesia sendiri, berada dalam aktivitas berbulan-bulan di rumah, atau keluar dengan alat kesehatan lengkap, berpotensi pula mengganggu tingkat kestabilan emosional masyarakat. Dampaknya, meski secara umum situasi relatif terkendali, angka infeksi COVID-19 hingga saat ini masih tinggi.

Upaya ini memperberat **prospek pemulihan** dari pandemi. Situasi karantina maupun Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) saat ini saja telah mengganggu kehidupan ekonomi. IMF dan Bank Dunia memperkirakan ekonomi global berada di angka minus 3 hingga 4% pada 2020. Hingga saat ini IMF mencatat sedikitnya US\$ 102 miliar telah dikucurkan untuk bantuan keuangan ke 83 negara dan menghapus utang senilai US\$ 488 juta di 29 negara. Selain itu, prospek pemulihan juga menjadi tantangan tersendiri dengan membuka ruang sejauh mana intervensi negara/pemerintah dapat membangun atau mewujudkan skema pemulihan yang baik dan berkelanjutan?

Pandemi global ini juga menimbulkan perang dan **pergeseran pengaruh aktor politik global**. Pada awal tahun seperti kita lihat, pandemi menyebabkan dua negara yakni Amerika Serikat (AS) dan juga Tiongkok bersitegang sedemikian rupa, saling tuduh dalam asal usul virus dan lainnya. Bahkan AS melalui Presiden Trump, menyatakan keluar dari WHO dengan menuduh organisasi tersebut tidak independen. AS yang kerap terlihat hadir dalam agenda-agenda global juga mundur dari sejumlah komitmen internasional termasuk Perjanjian Paris (*Paris Agreement*). Menarik kemudian apabila kita melihat ke depan, proyeksi pengaruh dari para aktor politik global, termasuk Indonesia pula, apabila dikaitkan dengan keterpilihan Joe Biden yang memberi warna tersendiri di politik domestik AS.

Pandemi juga menjadi ujian dan pertanyaan dalam arsitektur tata kelola global (*global governance*). Pertanyaan untuk **peran dari Organisasi Internasional (OI)**. Sebagai akibat dari pandemi, negosiasi-negosiasi multilateral yang kerap terjadi di OI mandek. Virus bahkan menghambat para aktor dan juga OI untuk bertindak ketika terjadi konflik di lapangan. Insiden yang terjadi antara Armenia dan Azerbaijan misalnya, sulit ditindaklanjuti oleh mediator dari OI seperti *Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE)* atau *Minsk Group* untuk mengkaji situasi lapangan—sebagai akibat larangan aktivitas bepergian yang dilakukan OI sebagaimana diurai Pierre Vimont, *senior fellow di Carnegie Europe*. Inefektivitas lainnya juga terlihat dari betapa berbulan-bulan Dewan Keamanan PBB dalam tahap awal pandemi, buntu dalam mengadopsi resolusi terkait COVID-19, kendati Majelis Umum berhasil membuahkan hasil resolusi. Kritik terhadap kerja WHO pun juga menjadi bahan yang

menarik untuk pembahasan mengenai bagaimana aktor tata kelola global, dalam hal ini OI melakukan perannya dalam koordinasi dan advokasi.

Pertanyaan-pertanyaan atas peran dan kinerja OI ini juga menjadi salah satu latar belakang bagaimana BKSAP pada 2020 membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengkaji peran OI dan menggali peluang untuk berperan dan memimpin OI dalam arsitektur global.

Tantangan diplomasi berikutnya muncul dari kancah digital. Dampak dari restriksi aktivitas membuat para diplomat maupun aktor hubungan luar negeri mencari mekanisme diplomasi lain. **Diplomasi Digital atau bagi sebagian kerap juga disebut “Zoomplomacy”** merujuk pada kerapnya penggunaan aplikasi “Zoom” sebagai mekanisme pertemuan virtual menjadi solusi.

Tetapi mekanisme digital ini menimbulkan tantangan baru. Bagi para diplomat, mekanisme diplomasi berpotensi berasa hambar. Mekanisme virtual dapat menjadi sarana dialog, tetapi bukan berarti dapat menjadi sarana negosiasi lebih dalam. Diplomasi digital menghambat ruang membangun jejaring, menumbuhkan ide-ide yang *off-the-record* dan mengurangi penggunaan mekanisme non-verbal. Interupsi pertemuan menjadi relatif lebih sulit dilakukan dalam mekanisme digital. Diskusi-diskusi di luar pertemuan formal dalam sesi *coffee break* misalnya, yang kerap jadi bagian alami proses internasional, tidak lagi ditemukan.

#### **f. Peluang Diplomasi Parlemen**

Meski demikian, diplomasi tetap memiliki ruang untuk pengembangan, bahkan selama pandemi COVID-19. Bagi BKSAP, pengembangan tersebut sangat terasa dengan beragam agenda dan kegiatan yang muncul dari rangkaian pertemuan virtual. Bagi BKSAP, diplomasi digital menjadi tantangan namun juga bagian dari peluang. BKSAP melihat peluang dari aktivitas pandemi yang serba terbatas. Beberapa di antaranya adalah:

- **Memperkaya dialog dan berbagi pengalaman.**

BKSAP memiliki peluang untuk tetap memperkaya dialog dan berbagi pengalaman dalam mengelola penanganan pandemi dengan parlemen-parlemen



negara lain. Tak terhitung kiranya, BKSAP membangun beragam diskursus, pertukaran pengalaman dengan negara lain dalam isu-isu seperti penanganan pandemi, penguatan pengawasan keuangan selama pandemi, hingga dalam diskusi ke arah pilihan opsi pemulihan hijau pasca-COVID-19.

Upaya-upaya memperkaya dialog dan berbagi pengalaman tersebut pada akhirnya akan bermanfaat ketika DPR menjalankan fungsinya di level domestik dalam penanganan beragam isu yang muncul terkait pandemi hingga pemulihannya.

- **Memperkuat kerja sama.**

BKSAP melihat dalam pandemi dan upaya pemulihan, kerja sama antar-parlemen dan antar-negara adalah sebagai hal yang esensial. Mekanisme bilateral termasuk melalui Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) menjadi bagian vital memperkuat kerja sama tersebut.

Oleh karenanya, BKSAP juga meningkatkan mekanisme bilateral dengan membentuk sedikitnya 102 GKSB pada periode 2019-2024, dua kali lipat dari GKSB periode 2014-2019. Ini semata-mata sebagai upaya memperkuat kerja sama dengan parlemen negara-negara lain dan memajukan politik bebas aktif yang dimiliki Indonesia.

Sejumlah GKSB bahkan telah melakukan pendalaman diskusi sebagai upaya menggali kesamaan pandangan untuk memperkuat kerja sama antar-ke dua negara ke depan. Sebagai contoh sebagai Ketua GKSB DPR RI – Kongres AS, saya melakukan telewicara dengan *Congressman* Ami Bera (Partai Demokrat) dan Ted Yoho (Partai Republik) pada kesempatan yang berbeda.

Dialog dan diskusi melalui GKSB tersebut menjadi wahana memfasilitasi segala isu yang berkembang di kedua negara, termasuk dalam hal ini mengenai isu pemulangan mahasiswa asal Indonesia selama pandemi hingga penguatan kerja sama pengembangan vaksin ke depan. Kongres AS dan GKSB DPR RI menyepakati prinsip umum mengenai pembagian vaksin yang harus merata dan tanpa terkecuali bagi seluruh masyarakat.

Sejumlah GKSBB lainnya, seperti GKSBB DPR RI – Parlemen Tiongkok, GKSBB DPR RI – Parlemen Turki, GKSBB DPR RI – Parlemen Peru dan lainnya juga telah melakukan telewicara untuk diskusi awal prospek penguatan kerja sama pascapandemi. Hal-hal ini merupakan peluang yang dilihat oleh BKSAP untuk tetap berdiplomasi dan sebagai persiapan para anggota DPR dengan informasi mendalam ketika beraktivitas internasional.

- **Memperluas pengaruh, membangun kepemimpinan global.**

BKSAP juga melihat, dengan dinamika aktor politik global saat ini, adalah tepat bagi Indonesia untuk memperluas pengaruhnya di dunia internasional. Oleh karenanya, DPR akan berupaya mengambil peran untuk memperluas pengaruh dan membangun kepemimpinan global melalui anggota DPR.

Sebagai contoh, saat ini Ketua DPR RI, Dr (H.C.) Puan Maharani terpilih mewakili Asia Pasifik untuk menjadi anggota Panitia Persiapan Konferensi Tingkat Tinggi IPU Ketua-Ketua Parlemen Dunia kelima (sesi fisik) pada 2021 nanti. Ketua DPR dalam posisi itu mendapatkan tempat spesial untuk ikut menyusun dan mendesain agenda dan tema dialog KTT yang akan dihelat. Agenda-agenda yang relevan dengan kepentingan internasional Indonesia tentu akan menjadi prioritas perjuangan dari DPR dalam forum tersebut.

- **Memperkuat dimensi parlemen dalam aktivitas multilateral.**

Salah satu manfaat diplomasi parlemen adalah mendorong koreksi atas sistem dan tata kelola global yang ada saat ini. Hal ini juga dapat dilakukan oleh parlemen dan juga BKSAP dalam situasi saat ini. Peluang untuk memperkuat dimensi parlemen juga mendapatkan dorongan di level internasional seiring berkembangnya wacana sayap parlemen PBB, khususnya termasuk dalam hal ini UN Parliamentary Assembly (UNPA).

IPU, meski berada dalam posisi yang relatif berbeda dengan wacana UNPA, memiliki mekanisme dialog dan kerja sama yang lebih erat dengan PBB sebagai jalur dialog dan komunikasi antarparlemen nasional dengan PBB dan OI lainnya. Kedua mekanisme tersebut, baik UNPA maupun kerja sama IPU dan PBB

menjadi peluang bagi BKSAP untuk diplomasi parlemen mengoreksi peran dari OI. Terlebih, Pembukaan Piagam PBB telah menegaskan konteks *We The People*, yang semestinya mencerminkan terminologi dari rakyat, bukan semata perwakilan-perwakilan pemerintah yang berkumpul di PBB.

*g. Moving Forward*

- **Mengisi kekosongan posisi-posisi internasional.**

Sebagai upaya untuk mengisi peluang diplomasi parlemen ke depan, BKSAP berkeinginan membangun kepemimpinan internasional khususnya pascapandemi dan memperluas pengaruh Indonesia di level internasional.

BKSAP tengah bersiap membidik sejumlah posisi internasional yang ada di berbagai organisasi antarparlemen, baik di IPU, Asian Parliamentary Assembly (APA) maupun di Parlemen OKI (PUIC). Di IPU misalnya, pada 2021 sejumlah posisi internasional Asia Pasifik di berbagai komite dan biro termasuk *Bureau of Young Parliamentarians* hingga Forum of Women Parliamentarians di IPU akan kosong. Tentu ini menjadi kesempatan bagi BKSAP untuk berjuang dan apabila terpilih dapat mendikte isu, membangun kepemimpinan dan memperluas pengaruh.

- **Memperkuat keterhubungan antar-parlemen.**

BKSAP juga memproyeksikan meningkatnya keterhubungan aktivitas antara DPR RI dengan Parlemen negara lain melalui GKSB yang telah terbentuk. Ekspektasi saat ini keterhubungan dapat pula dibangun hingga level keterhubungan antara DPR dengan aktor-aktor negara lainnya dalam berbagai mekanisme baik formal dan non-formal.

Selain itu, BKSAP perlu memikirkan upaya ke depan untuk secara lebih dekat mendapatkan *first-hand information* dari parlemen-parlemen negara/kawasan strategis yang berpengaruh bagi perkembangan domestik Indonesia. Sejumlah parlemen telah membangun keterhubungan lebih erat dengan DPR di Indonesia seperti Atase Parlemen yang dimiliki Korea Selatan hingga adanya kantor *Library of Congress* di Kedutaan AS yang ada di Jakarta. Kabar terbaru adalah

Parlemen Uni Eropa bersiap mendirikan Kantor Penghubung di Jakarta untuk mempermudah interaksi Parlemen Uni Eropa dengan DPR RI dan AIPA.

Tentu ini merupakan sesuatu yang menggembirakan yang menunjukkan strategisnya DPR dan Indonesia dalam skala yang lebih luas bagi kepentingan mereka. BKSAP perlu melihat ini sebagai hal yang perlu dipikirkan serius untuk secara resiprokal membentuk mekanisme serupa di sejumlah negara strategis.

- **Memperkuat posisi dalam upaya pencapaian komitmen global.**

Dalam sejumlah isu-isu dan komitmen global, BKSAP berkomitmen untuk selalu fokus, meski COVID-19 menghadang. BKSAP berdiskusi dengan IPU dalam upaya tetap memperhatikan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs).

Pada 2021, DPR akan menjadi tuan rumah IPU *1<sup>st</sup> Global Parliamentary Meeting to Achieve the SDGs* yang tentu dapat menjadi momentum bagi DPR memperkuat posisinya dalam pencapaian SDGs khususnya isu-isu pemulihan pasca-COVID-19. Oleh karenanya, pada 2021, BKSAP berencana membentuk Panja SDGs untuk elaborasi komitmen SDGs Indonesia baik dalam isu pemulihan kesehatan, ekonomi hijau hingga perubahan iklim.

Dalam isu-isu terkait ekonomi hijau dan perubahan iklim, BKSAP telah berdiskusi dengan sejumlah parlemen negara lain seperti UK dan lainnya dalam menggali opsi pemulihan hijau. Isu perubahan iklim menjadi isu *highlight* pada waktu-waktu ke depan seiring dengan meningkatnya negara-negara yang telah mendeklarasikan komitmen emisi nol pada 2050. Dialog dan diskusi mengenai isu tersebut merupakan peluang bagi Indonesia untuk berkontribusi pada upaya pemulihan pascapandemi.

- **Memperluas peran BKSAP untuk asistensi internasional.**

BKSAP dapat mempertimbangkan untuk memperluas perannya mendukung komponen inti pelaksanaan diplomasi. Kerja sama sebagaimana termaktub dalam UU terbatas pada kerja sama formal dengan negara, parlemen, maupun organisasi internasional. Ke depan, BKSAP dapat memperluas kerja sama

dengan organisasi masyarakat sipil negara lain hingga individu-individu tertentu dengan inisiatif-inisiatif yang dapat mendorong pemanfaatan aset *soft power* Indonesia.

Konteks kerja sama dapat pula ditindaklanjuti dalam kerangka regulasi melalui dukungan teknis hingga asistensi internasional yang dilakukan BKSAP ke parlemen/negara tertentu. Penguatan peran dapat dilakukan melalui revisi UU MD3 maupun revisi Tata Tertib DPR.

2. **Irena Yusiana Roba**, Anggota BKSAP (F-PDIP) menyampaikan paparan sebagai berikut:

**a. Pengalaman terkait mengikuti sidang-sidang internasional**

Beliau menceritakan pengalamannya bertugas di BKSAP dalam mengemban tugas diplomasi yang diamanatkan konsitusi dan manfaatnya dalam pelaksanaan tugas parlemen yang dilakukan. Ada beragam forum internasional yang telah diikuti, mulai dari sidang-sidang di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Parlemen Uni Eropa, ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), hingga forum antar parlemen yang bernama Inter-Parliamentary Union (IPU). Sidang IPU pertama kali yang diikuti diselenggarakan di Jenewa, Swiss pada 2016. Saat itu beliau bertemu dan berdialog dengan para anggota parlemen dari Afrika, Asia, Eropa, Amerika, yang membawa banyak kisah perjuangan yang menarik.

Manfaat tersebut berjalan dua arah, yakni delegasi Indonesia dapat belajar dari pengalaman anggota parlemen negara lain. Di sisi lain, mereka juga mengatakan banyak belajar dari dinamika yang dijalankan di Indonesia. Bagi mereka, Indonesia selalu contoh menarik karena besarnya populasi dan beragamnya penduduk yang tinggal di ribuan pulau. Termasuk Maluku Utara yang merupakan daerah asal beliau, yang punya ribuan pulau, sekitar 1.400-an pulau.

Di forum IPU, para anggota diminta untuk berbicara tentang tantangan dan peluang yang dihadapi di negara masing-masing, dan solusi yang ditempuh. Termasuk mengemban tanggung jawab sebagai warga dunia dalam pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Pembahasan yang selalu muncul dalam agenda IPU

adalah terkait SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang terdiri dari 17 tujuan, SDGs ditetapkan oleh PBB pada tahun 2015 untuk menuju masa depan yang lebih baik bagi semua orang, dengan target waktu 2030.

Tujuan-tujuan itu bersifat mendasar seperti mengentaskan kemiskinan, fasilitas kesehatan, pendidikan berkualitas, hingga pemberdayaan perempuan. Bagi Indonesia, semua itu sangat menguntungkan Indonesia Timur, karena dibanding lainnya kawasan Timur relatif tertinggal dalam pembangunan. Di sana beliau menekankan, Bersama anggota parlemen lain selalu berperan untuk memastikan komitmen negara Indonesia, memastikan kita berada di jalur yang benar untuk mencapai tujuan-tujuan itu pada 2030.

Dari semua topik dibicarakan di forum IPU, hal yang paling berkesan bagi beliau adalah: kesetaraan gender dan peran anak muda. Dua hal itu sangat erat dengan beliau sebagai anggota parlemen perempuan yang tergolong muda. Dalam sidang-sidang IPU maupun di obrolan santai di sela-sela forum, beliau menemui banyak perempuan dan pemuda hebat dari berbagai negara, dengan pengetahuan dan pengalaman inspiratif.

Sebagai contoh, dalam sidang IPU di Jenewa tersebut, beliau bertukar pikiran tentang peran strategis perspektif gender dalam penyusunan anggaran. Anggaran publik yang hanya disusun dan diawasi oleh lelaki saja berpotensi meminggirkan hak perempuan sebagai warga negara. Ini karena perempuan memiliki kebutuhan yang berbeda dari laki-laki, maka perempuan harus memiliki akses terhadap fasilitas yang sesuai. Misalnya, tentang dukungan fasilitas publik bagi perempuan hamil atau menyusui, yang lebih mengerti detail tentang ini adalah perempuan, bukan laki-laki. Sehingga, perlu ada perempuan yang terlibat dalam penyusunan kebijakan dan anggaran fasilitas publik di masyarakat, itulah mengapa kehadiran perempuan dalam parlemen itu penting. Termasuk dari Indonesia Timur, yang tantangannya lebih besar daripada wilayah lain.

Di Indonesia saat ini, kita sudah memiliki aturan kuota minimal 20% dalam pencalonan anggota legislatif. Tapi ini baru saat pendaftaran, belum tentu yang 20% itu terpilih, karena seringkali calon perempuan diletakkan di nomor urut bawah. Saat

ini, ada diskusi supaya angka 20% itu naik menjadi 50%. Dengan membandingkan pengalaman para kolega dari negara maju dan berkembang, beliau juga menyadari betapa anggaran kita masih sangat “maskulin” atau “laki-laki”, padahal setengah populasi Indonesia adalah perempuan. Mayoritas fasilitas publik masih dominan dipandang dari sudut dan kebutuhan laki-laki. Kebijakan pun dibuat, diawasi, dan dilaksanakan oleh laki-laki, dan perempuan kurang mendapat tempat. Padahal, perempuan membawa pandangan dan talenta yang berbeda yang memengaruhi pembentukan agenda politik.

**b. Diplomasi anak muda.**

Di dalam IPU, beliau mendapat kehormatan sebagai *board member of Young Parliamentarians Forum*, yang membuat beliau bisa lebih intens dalam berdiplomasi dengan anggota negara lain dan mendalami pengalaman mereka, termasuk dengan para pengurus IPU. Menurut studi IPU, anggota parlemen muda dibutuhkan karena akan memberikan perspektif anak muda dalam pengambilan kebijakan. Hal ini juga didorong oleh Sekretaris-Jenderal PBB, sehingga IPU mendorong adanya target supaya minimal 25% anggota parlemen berusia di bawah 40 tahun. Menurut survei IPU pada 2018 tentang partisipasi anak muda di parlemen nasional di 130 negara, 15,5 persen anggota parlemen dunia berusia di bawah 40 tahun, naik dari 14,2% pada 2016. Menurut data IPU (2018) tersebut, Indonesia berada di peringkat ke-68, yakni sebanyak 17,8% anggota parlemennya berusia di bawah 40 tahun. Angka Indonesia sudah lebih baik dibanding rata-rata global, tapi masih jauh dari target ideal yang disampaikan IPU.

Terkait pandemi, ketika terjadi realokasi anggaran negara di Kementerian, kami mendorong supaya menggunakan prinsip dalam SDGs, yaitu “*no one left behind*”. Tidak ada warga negara Indonesia, baik di daerah terpencil sekalipun, yang dilupakan. Beliau selalu menyatakan bahwa para anggota parlemen selalu mengupayakan, jangan sampai perempuan dan anak muda terpinggirkan dalam alokasi anggaran negara selama pandemi.

Semangat ini dimulai sejak hulu, saat saya rapat kerja bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), misalnya, dalam rapat anggaran realokasi Rp 500 miliar untuk para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang terkena dampak, hingga ke hilir, saat *Irine Center* melaksanakan program “Balasa” atau bantuan lauk pauk siap saji

dari Kemenparekraf, yang dikelola oleh Irine Center bersama komunitas UMKM dan komunitas ibu-ibu.

Beliau telah menemui banyak komunitas anak muda dan perempuan, pelaku industri wisata, pelaku ekonomi kreatif dan berdiskusi tentang apa yang sekiranya bisa membangun pariwisata di Morotai, Halmahera Barat, Ternate, dan kabupaten/kota lain. Ada banyak sekali potensi wisata dan ekonomi kreatif di Maluku Utara. Ini butuh diplomasi parlemen mulai hulu, yaitu terkait SDGs dan realokasi anggaran, hingga hilir, yaitu pelaksanaan di lapangan, supaya sesuai dengan semangat yang diusung. Prinsip-prinsip perjanjian internasional dalam forum diplomasi seperti IPU menjadi semangat yang memandu pelaksanaan program-program SDGs dan realokasi anggaran pada masa dan pasca pandemi.

Namun, dari semua forum internasional itu, ada satu mimpi yang masih belum tercapai, yaitu terkait regulasi sampah plastik yang dipelajari pelajari saat sidang IPU di Azerbaijan. Ketika itu, beliau berdialog secara hangat dengan seorang delegasi dari Rwanda, Afrika, yang merupakan salah satu motor dalam kebijakan pelarangan penggunaan plastik secara total di negaranya. Rwanda adalah satu dari empat negara Afrika yang sudah mengatur pelarangan total (*total ban*) penggunaan plastik di negara mereka.

Mimpi beliau adalah, kita membuat kebijakan yang bisa melibatkan para kepala daerah secara aktif dalam pelarangan ini, melalui kesadaran tentang bahaya sampah plastik sekali pakai bagi lingkungan. Bagi Maluku Utara, dengan kekayaan wisata alam yang melimpah, sampah plastik adalah ancaman besar. Karena nilai jual kita adalah kelestarian lingkungan hidup, dan sampah plastik adalah salah satu musuh terbesarnya.

Pada penutup presentasinya, beliau menyampaikan bahwa program-program yang dijalankan di Maluku Utara juga hasil dari keterlibatannya dalam forum-forum internasional tersebut, karena mengemban tanggung jawab bersama sebagai warga dunia termasuk membangun kesadaran atas pencapaian. SDGs. Hal itu penting, demi kebaikan seluruh manusia. Kita perlu bekerja sesuai jadwal, supaya Indonesia bisa mencapainya pada 2030, tidak ketinggalan dari negara lain.



Beliau memiliki harapan semoga acara sore ini semakin membawa kita pada kesamaan pandangan, bahwa semua aspek itu saling terhubung. Apa yang tim *Irine Center* lakukan di berbagai kabupaten ada hubungannya dengan diplomasi internasional yang dijalankan bersama BKSAP, keduanya saling mendukung dan memperkaya. Semoga *Irena Center* bersama seluruh peserta yang mengikuti webinar ini bisa terus bersinergi, hingga pasca pandemi, karena pasti akan ada banyak perubahan yang terjadi pada 2021.

### III. PENUTUP

#### A. ANGGARAN

Anggaran yang dipergunakan dalam penyelenggaraan acara ini adalah Rp. 8.200.000 (Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

#### B. KATA PENUTUP

Demikianlah pokok-pokok laporan pelaksanaan Webinar “Tantangan dan Peluang Diplomasi Parlemen dalam Pemulihan Pasca-COVID-19” Selasa, 8 Desember 2020 di Jakarta.

Jakarta, 21 Desember 2020

a.n. KETUA RAPAT



Chairil Patria, S.IP., M.Si.  
NIP. 197111051998031002